

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia saat ini telah memposisikan desa sebagai fokus utama pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan di sektor desa yaitu dengan pemberian dana desa langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa untuk meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat dari pinggiran dan desa-desa. Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia di bidang pembangunan terutama peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan di jajaran desa dapat dilihat dari tingkat kenaikan alokasi dana desa yang diberikan pemerintah kepada seluruh desa yang ada di Indonesia.

Semenjak awal tahun 2016 dana desa telah dinaikkan jumlahnya menjadi Rp. 46.900.000.000.000 atau dua kali lipat lebih besar dibanding 2015 yang hanya sebesar Rp. 20.700.000.000.000, yang disajikan pada website resmi kemenkeu (<https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>). Berdasarkan adanya kenaikan jumlah pengalokasian dana desa maka setiap desa akan mengelola uang atau dana desa secara mandiri sebesar Rp. 500.000.000 hingga Rp. 800.000.000 per desa.

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran

pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Usaha mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang dapat memengaruhi kedua aspek tersebut. Cheng et al. (2002) menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut memengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Kalbers dan Forgaty (1995) menambahkan selain adanya internal controlling dalam sebuah pemerintahan turut memengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi public.

Faktor yang menentukan akuntabilitas dan transparansi suatu pemerintahan adalah implementasi *Good Government Governance*. Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah sistem pengendalian dalam pemerintahan, disebabkan adanya sistem pengendalian dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah Desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa tersebut. Uddin dan Hopper (2001) menyebutkan bahwa pimpinan dalam sebuah organisasi memiliki bentuk pengendalian agar dalam sistem perencanaan (penganggaran desa) *output* yang dihasilkan memiliki kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat Desa.

Berdasarkan fenomena yang peneliti temukan di pemerintah Desa Se-Kecamatan Nguntoronadi Magetan, tingkat akuntabilitas dan transparansi masih sangat rendah. Data yang diperoleh dari IACF (2010) menyebutkan bahwa Kabupaten Magetan memperoleh alokasi dana desa (ADD) tahun

2014 sebesar Rp1 Miliar. Namun sama halnya dengan pemerintah lainnya, secara umum pemerintah Desa masih belum bisa mengalokasikan dana Desa tersebut sehingga sering terjadi permasalahan dalam hal akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD.

Fenomena lain yang peneliti temukan bahwa pengetahuan masyarakat terutama pemerintah Desa di daerah Magetan masih minim dalam mengelola dana keuangan desa. Kompetensi yang dimiliki oleh pemerintah Desa terkait pengelolaan dana Desamasih belum mampu mengelola dana tersebut. Pengetahuan akan mengelola dana desa bahkan membuat laporan keuangan masih sangat minim sehingga yang dikhawatirkan adanya sebuah *asymmetry* information yang terjadi atas laporan keuangan di publikasikan kepada publik. (PP Nomor 60 tahun 2014)

Penelitian sebelumnya telah banyak meneliti mengenai faktor-faktor yang bisa memengaruhi akuntabilitas dan transparansi suatu organisasi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Laswadet al., 2005; Grimmelikhuijsen, 2013; Fung et al., 2007; Cheng et al., 2002; dan Kalbers dan Fogarty, 1995).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jermias dan Setiawan (2008) melakukan penelitian di tiga kota besar di Indonesia untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja dengan dimoderasi oleh sistem pengendalian dan hierarchical level suatu unit pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintahan. Penelitian ini juga

memberikan bukti bahwa variabel moderasi yaitu sistem pengendalian dan hierarchical level memperkuat hubungan antar variabel partisipasi anggaran dan kinerja pemerintahan. Penelitian ini hanya melihat aspek desentralisasi tanpa melihat kompetensi yang dimiliki serta sistem yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah publik. Penelitian ini menggunakan accountability framework yang dikembangkan oleh Iyoha dan Oyerinde (2009) untuk menginvestigasi secara komprehensif faktor-faktor yang dapat menentukan tingkat akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD).

Iyoha dan Oyerinde (2009) mengemukakan bahwa *accountability framework* yang dikembangkan merupakan tingkatan/level akuntansi agar akuntabilitas publik bisa berjalan dengan baik yang dimulai dari tahapan *accounting infrastructure* yaitu mengungkap tentang sejauh mana akuntan yang professional mampu mengelola dana keuangan sehingga harapannya informasi yang dihasilkan menjadi tepat waktu. Lebih lanjut, tahapan selanjutnya adalah *accounting practice* dan *accounting culture*. Kedua poin ini menjadi fokus dalam *accountability framework* (Iyoha dan Oyerinde, 2009) karena baik *accounting practice* dan *accounting culture* mengungkap bahwa dalam proses akuntabilitas pemerintahan dipengaruhi oleh standar akuntansi internasional yang harus diterapkan ke negara Indonesia, lebih khususnya lagi adalah pemerintah daerah.

Selain itu, tingkatan akuntabilitas publik dipengaruhi oleh sistem informasi yang saling terintegrasi yang sebaiknya informasi tersebut tepat

waktu, memadai, dapat diandalkan serta relevan dengan kebutuhan *stakeholders* dalam hal ini adalah rakyat (Iyoha dan Oyerinde 2009). *Accountability framework*, faktor individu dan sistem yang diterapkan dalam sebuah pemerintahan menjadi fokus penting dalam meningkatkan akuntabilitas. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Namun tidak hanya itu sistem pengendalian yang digunakan juga sangat mendukung keberhasilan akuntabilitas desa.

Mengacu pada penelitian dilakukan oleh Nofianto dan Suseno (2014) dan Jermias dan Setiawan (2008) serta melihat fenomena yang terjadi di lapangan maka peneliti merumuskan faktor-faktor kondisional yang terdiri atas Kompetensi Aparatur Desa, dan sistem pengendalian. Kompetensi Aparatur Desa menjadi suatu faktor yang penting untuk dibahas mengingat kompetensi merupakan faktor internal dan menjadi suatu yang penting.

Kompetensi Aparatur Desa di pemerintah desa tergolong masih sangat lemah ketika harus mengelola alokasi dana desa (ADD) yang terbilang cukup besar. Kondisi serupa dipertegas oleh (Leunget al., 2009) yang menjelaskan mengenai pentingnya peran auditor internal dalam mendukung *corporate governance* sebuah entitas. Namun agar peran auditor internal berhasil guna mendukung *corporate governance* maka diperlukan kompetensi yang cukup dalam menjamin keberhasilan manajemen dan integritas dalam suatu entitas.

Faktor kedua dalam mendukung akuntabilitas adalah sistem

pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan publik, dinilai masih belum mampu untuk dapat memberikan akuntabilitas publik dengan adanya opini dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan oleh pemerintah. Berdasarkan sumber yang diperoleh di BPK terdapat hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Magetan masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam implementasi sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan, Hal ini mencerminkan bahwa tingkat pengendalian intern pemerintahan masih kurang efektif.

Faktor kompetensi dan sistem pengendalian yang telah diuraikan sebelumnya diduga dapat memengaruhi tingkat akuntabilitas alokasi dana desa (ADD) Pemerintah Desa. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dalam hal aparatur pemerintah, sistem pengendalian dari pihak internal yaitu inspektorat yang semakin tinggi maka dapat meningkatkan akuntabilitas Pemerintah desa terhadap publik. Level ini dapat dikategorikan sebagai bagian *accounting infrastructure*, *accounting culture*, dan *accounting practice* berdasarkan *accountability framework* yang dikembangkan oleh (Iyoha dan Oyerinde 2009).

Akuntabilitas merupakan salah satu konsep yang penting dimiliki oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Tidak hanya entitas bisnis, namun pada pemerintahan publik dalam hal ini Pemerintah Desa bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder/rakyat* merupakan sebuah tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah selaku

pengelola. Hal ini penting mengingat bila sebuah pemerintah melakukan akuntabilitas dengan melaporkan segala aktivitas yang terjadi di lingkungan pemerintah maka hal ini dapat meningkatkan reputasi pemerintah tersebut sehingga ke depannya pemerintah mendapat banyak dukungan dari *stakeholders* dalam menjalankan pemerintahan. Namun yang terjadi di lapangan khususnya Pemerintahan Desa akuntabilitas tidak berjalan seperti yang diharapkan. Adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat tidak berjalan sesuai dengan harapan. (Iyoha dan Oyerinde 2009)

Hal ini penting karena pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut merupakan langkah awal untuk menyusun strategi yang tepat dalam mengintegrasikan faktor-faktor tersebut dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan ADD sehingga Pemerintah baik Pusat maupun Desa dapat mengambil kebijakan sekaligus melakukan pelatihan SDM untuk menunjang pengelolaan ADD yang pada akhirnya visi dan misi Pemerintah Desa dapat tercapai. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat penelitian ini berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Nguntoronadi Magetan”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Nguntoronadi Magetan?

2. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Nguntoronadi Magetan?
3. Apakah kompetensi aparatur desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Nguntoronadi Magetan?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Nguntoronadi Magetan.
2. Mengetahui pengaruh sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Nguntoronadi Magetan.
3. Mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa dan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Nguntoronadi Magetan.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi suatu manfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak – pihak yang



terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini dapat menambah kekayaan literatur yang dapat digunakan sebagai bahan untuk referensi mengenai pengembangan teori yang berkaitan dengan sistem pengendalian instansi pemerintah

2. Bagi Pemerintah Daerah

Untuk memberikan kontribusi untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, sumber daya manusia yang kompeten dan sistem pengendalian intern pemerintah dalam rangka mencapai tujuan instansi secara efektif, efisien, menyampaikan laporan keuangan secara berkualitas, mengamankan aset dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

3. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengaruhnya terhadap pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia dan akuntabilitas keuangan daerah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi publik dan bahan referensi penelitian selanjutnya.